



**LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
( L A P A N )**

JALAN PEMUDA PERSIL NOMOR 1, JAKARTA 13220  
TELEPON (021) 4892802, 4895040, FAKSIMILE (021) 4894815, 4892884,  
SITUS : [www.lapan.go.id](http://www.lapan.go.id)

---

**PERATURAN  
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
NOMOR 02 TAHUN 2016  
TENTANG  
KELAS JABATAN  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1157.2/M.PAN-RB/2/2016 Hal Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

Mengingat...

Mengingat

- :
1. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
  2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
  5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  6. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

7. Keputusan...

7. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
8. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
12. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
13. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer;
14. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer dan Penginderaan Jauh Biak;
15. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut;
16. Peraturan...

16. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan kelas jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.

BAB II...

## BAB II

### PENETAPAN KELAS JABATAN

#### Pasal 2

Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

- a. Kelas Jabatan Struktural sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- b. Kelas Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- c. Kelas Jabatan Fungsional Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## BAB III

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 3

Peraturan Kepala tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2016.

BAB IV...

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

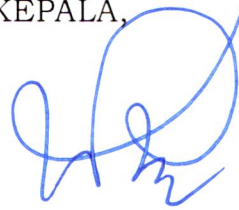
Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini maka Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 MAR 2016

KEPALA,



THOMAS DJAMALUDDIN

LAMPIRAN I  
 PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN  
 ANTARIKSA NASIONAL  
 NOMOR 02 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA  
 PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

KELAS JABATAN STRUKTURAL  
 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
1.	Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	Tanpa Kelas
Eselon I		
2.	Sekretaris Utama	16
3.	Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer	16
4.	Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa	16
5.	Deputi Bidang Penginderaan Jauh	16
Eselon II		
6.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	15
7.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum	15
8.	Kepala Biro Kerjasama, Hubungan Masyarakat, dan Umum	15
9.	Kepala Pusat Sains Antariksa	15
10.	Kepala Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer	15
11.	Kepala Pusat Teknologi Penerbangan	15
12.	Kepala Pusat Teknologi Roket	15
13.	Kepala Pusat Teknologi Satelit	15
14.	Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh	15
15.	Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh	15
16.	Inspektur	15
17.	Kepala Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa	15
18.	Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara	15
19.	Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa	15

Eselon III		
20.	Kepala Bagian Perencanaan	12
21.	Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi	12
22.	Kepala Bagian Keuangan	12
23.	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	12
24.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	12
25.	Kepala Bagian Hukum	12
26.	Kepala Bagian Kerjasama	12
27.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat	12
28.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Barang Milik Negara	12
29.	Kepala Bagian Persuratan dan Arsip	12
30.	Kepala Bidang Program dan Fasilitas Pusat Sains Antariksa	12
31.	Kepala Bidang Diseminasi Pusat Sains Antariksa	12
32.	Kepala Bagian Administrasi Pusat Sains Antariksa	11
33.	Kepala Bidang Program dan Fasilitas Pusat Sains Teknologi dan Atmosfer	12
34.	Kepala Bidang Diseminasi Pusat Sains Teknologi dan Atmosfer	12
35.	Kepala Bagian Administrasi Pusat Sains Teknologi dan Atmosfer	11
36.	Kepala Bidang Program dan Fasilitas Pusat Teknologi Penerbangan	12
37.	Kepala Bidang Diseminasi Pusat Teknologi Penerbangan	12
38.	Kepala Bagian Administrasi Pusat Teknologi Penerbangan	11
39.	Kepala Bidang Program dan Fasilitas Pusat Teknologi Roket	12
40.	Kepala Bidang Diseminasi Pusat Teknologi Roket	12
41.	Kepala Bagian Administrasi Pusat Teknologi Roket	11
42.	Kepala Bidang Program dan Fasilitas Pusat Teknologi Satelit	12
43.	Kepala Bidang Diseminasi Pusat Teknologi Satelit	12
44.	Kepala Bagian Administrasi Pusat Teknologi Satelit	11



45.	Kepala Bidang Program dan Fasilitas Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh	12
46.	Kepala Bidang Diseminasi Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh	12
47.	Kepala Bagian Administrasi Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh	11
48.	Kepala Bidang Program dan Fasilitas Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh	12
49.	Kepala Bidang Diseminasi Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh	12
50.	Kepala Bagian Administrasi Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh	11
51.	Kepala Bagian Administrasi Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa	11
52.	Kepala Bagian Administrasi Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara	11
53.	Kepala Bidang Pelayanan dan Promosi	12
54.	Kepala Bidang Inovasi dan Kemitraan	12
55.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Tata Kelola Teknologi Informasi	12
56.	Kepala Bidang Sistem Informasi	12
57.	Kepala Bidang Standar Penerbangan dan Antariksa	12
58.	Kepala Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer, dan Penginderaan Jauh Biak	13
59.	Kepala Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut	13
60.	Kepala Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam	13
61.	Kepala Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pontianak	13
62.	Kepala Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Sumedang	13
63.	Kepala Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pasuruan	13
64.	Kepala Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare	13
Eselon IV		
65.	Kepala Subbagian Perencanaan Program dan Kinerja	9

66.	Kepala Subbagian Perencanaan Anggaran	9
67.	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Perencanaan dan Keuangan	9
68.	Kepala Subbagian Pemantauan	9
69.	Kepala Subbagian Evaluasi	9
70.	Kepala Subbagian Perbendaharaan dan Verifikasi	9
71.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Laporan Keuangan	9
72.	Kepala Subbagian Perencanaan Sumber Daya Manusia	9
73.	Kepala Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia	9
74.	Kepala Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia	9
75.	Kepala Subbagian Organisasi	9
76.	Kepala Subbagian Tata Laksana	9
77.	Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan	9
78.	Kepala Subbagian Advokasi dan Hak Kekayaan Intelektual	9
79.	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro SDM, Organisasi, dan Hukum	9
80.	Kepala Subbagian Kerjasama Dalam Negeri	9
81.	Kepala Subbagian Kerjasama Luar Negeri	9
82.	Kepala Subbagian Publikasi dan Layanan Informasi Publik	9
83.	Kepala Subbagian Edukasi Publik	9
84.	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Kerjasama, Hubungan Masyarakat dan Umum	9
85.	Kepala Subbagian Layanan Pengadaan	9
86.	Kepala Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara	9
87.	Kepala Subbagian Rumah Tangga	9
88.	Kepala Subbagian Persuratan	9
89.	Kepala Subbagian Arsip dan Perpustakaan	9
90.	Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol	9
91.	Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara Pusat Sains Antariksa	9

92.	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha Pusat Pusat Sains Antariksa	9
93.	Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer	9
94.	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer	9
95.	Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara Pusat Teknologi Penerbangan	9
96.	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha Pusat Teknologi Penerbangan	9
97.	Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara Pusat Teknologi Roket	9
98.	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha Pusat Teknologi Roket	9
99.	Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara Pusat Teknologi Satelit	9
100.	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha Pusat Teknologi Satelit	9
101.	Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh	9
102.	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh	9
103.	Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh	9
104.	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh	9
105.	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat	9
106.	Kepala Subbagian Program dan Keuangan Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa	9
107.	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia dan Umum Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa	9
108.	Kepala Subbagian Program dan Keuangan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara	9
109.	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia dan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara	9

110.	Kepala Subbidang Infrastruktur Teknologi Informasi	9
111.	Kepala Subbidang Tata Kelola Teknologi Informasi	9
112.	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Teknologi Informasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa	9
113.	Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer, dan Penginderaan Jauh Biak	9
114.	Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut	9
115.	Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam	9
116.	Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pontianak	9
117.	Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Sumedang	9
118.	Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pasuruan	9
119.	Kepala Subbagian Tata Usaha Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare	9

KEPALA,



THOMAS DJAMALUDDIN

LAMPIRAN II  
PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN  
ANTARIKSA NASIONAL  
NOMOR 02 TAHUN 2016  
TENTANG  
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA  
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

KELAS JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU  
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
1.	Peneliti Utama	13
2.	Peneliti Madya	11
3.	Peneliti Muda	9
4.	Peneliti Pertama	8
5.	Auditor Madya	11
6.	Auditor Muda	9
7.	Auditor Pertama	8
8.	Auditor Penyelia	8
9.	Auditor Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
10.	Arsiparis Madya	11
11.	Arsiparis Muda	9
12.	Arsiparis Pertama	8
13.	Arsiparis Penyelia	8
14.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
15.	Arsiparis Pelaksana/Terampil	6
16.	Analisis Kepegawaian Madya	11
17.	Analisis Kepegawaian Muda	9
18.	Analisis Kepegawaian Pertama	8
19.	Analisis Kepegawaian Penyelia	8
20.	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
21.	Analisis Kepegawaian Pelaksana/Terampil	6
22.	Perencana Madya	11
23.	Perencana Muda	9
24.	Perencana Pertama	8
25.	Perekayasa Utama	13

26.	Perekayasa Madya	11
27.	Perekayasa Muda	9
28.	Perekayasa Pertama	8
29.	Pranata Humas Madya	11
30.	Pranata Humas Muda	9
31.	Pranata Humas Pertama	8
32.	Pranata Humas Penyelia	8
33.	Pranata Humas Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
34.	Pranata Humas Pelaksana/Terampil	6
35.	Pranata Humas Pemula	5
36.	Pranata Komputer Utama	13
37.	Pranata Komputer Madya	11
38.	Pranata Komputer Muda	9
39.	Pranata Komputer Pertama	8
40.	Pranata Komputer Penyelia	8
41.	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
42.	Pranata Komputer Pelaksana/Terampil	6
43.	Pranata Komputer Pemula	5
44.	Pustakawan Madya	11
45.	Pustakawan Muda	9
46.	Pustakawan Pertama	8
47.	Pustakawan Penyelia	8
48.	Pustakawan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
49.	Pustakawan Pelaksana/Terampil	6
50.	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Penyelia	8
51.	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
52.	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Pelaksana/Terampil	6
53.	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Pemula	5
54.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya	11
55.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	9
56.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	8
57.	Penerjemah Muda	9
58.	Penerjemah Pertama	8
59.	Pengendali Dampak Lingkungan Muda	9
60.	Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia	8

61.	Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana Lanjutan	7
62.	Analisis Kebijakan Utama	13
63.	Analisis Kebijakan Madya	11
64.	Analisis Kebijakan Muda	9
65.	Analisis Kebijakan Pertama	8
66.	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Madya	11
67.	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda	9
68.	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama	8

KEPALA,



THOMAS DJAMALUDDIN

LAMPIRAN III  
PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN  
ANTARIKSA NASIONAL  
NOMOR 02 TAHUN 2016  
TENTANG  
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA  
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

KELAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM  
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
1.	Analisis Pengelola Barang Milik Negara	7
2.	Pengadministrasian Usaha Barang Milik Negara	6
3.	Bendahara	7
4.	Analisis Laporan Keuangan	7
5.	Analisis Keuangan	7
6.	Pranata Laporan Keuangan	6
7.	Verifikator Keuangan	6
8.	Pengadministrasian Keuangan	6
9.	Analisis Pengembangan Sarana Prasarana	7
10.	Pengelola Sarana Prasarana	6
11.	Komandan Petugas Keamanan	5
12.	Sekretaris Pimpinan	6
13.	Pengadministrasian Umum	5
14.	Analisis Pengadaan Barang dan Jasa	7
15.	Pengelola Administrasi Barang dan Jasa	6
16.	Analisis Kerjasama	7
17.	Pengelola Data	6
18.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7
19.	Pengadministrasian Layanan Informasi dan Publikasi	6
20.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7
21.	Analisis Monitoring dan Evaluasi	7
22.	Pengelola Bahan Perencanaan dan Program	6
23.	Analisis Manajemen Kepegawaian	7
24.	Analisis Organisasi	7
25.	Analisis Tata Laksana	7
26.	Analisis Hukum	7



27.	Analisis Teknologi Informasi	7
28.	Analisis Manajemen Pemasaran	7
29.	Analisis Pemanfaatan Produk Teknologi Dirgantara	7
30.	Penelaah Laporan Hasil Pemeriksaan dan Kerugian Negara	7

KEPALA,



THOMAS DJAMALUDDIN